



# Perizinan Turut Picu Suap

**Birokrasi pelayanan publik yang lamban di daerah diduga disengaja agar pemohon melakukan suap supaya izin bisa segera diterbitkan oleh aparat birokrasi.**

**JAKARTA, KOMPAS** — Upaya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyederhanakan perizinan dengan membangun sistem yang transparan melalui pelayanan terpadu satu pintu belum sepenuhnya berjalan di daerah. Birokrasi pelayanan publik di daerah cenderung lamban tanpa standar waktu penyelesaian sehingga secara tidak langsung turut memicu praktik suap.

Pengusaha terpaksa menyuap birokrat untuk mempercepat proses perizinan di daerah. Praktek ini pada akhirnya turut membuat harga produk menjadi mahal karena masyarakat harus ikut menanggung biaya untuk menyuap birokrat tersebut.

Berdasarkan Indeks Kemudahan Berusaha Tahun 2019 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia, yang diwakili DKI Jakarta dan Surabaya, menempati peringkat ke-73 dari 190 negara, turun selangkah dari tahun 2018. Penurunan peringkat ini menjadi refleksi bahwa reformasi birokrasi di sebagian daerah belum optimal. Pengurusan izin konstruksi, izin memulai usaha, serta peralihan hak atas tanah dan bangunan belum sesuai harapan publik.

"Ketiga perizinan itu ada di bawah pemerintah daerah. Birokrasi kita masih lama dalam prosedur, dan pengajuan izin sering digantung. Bahkan, kerap ada negosiasi dengan pengurus izin yang sebenarnya tak perlu," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jiweng di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Praktik itu yang kerap membuat birokrat dan pengusaha ditanggap aparat penegak hukum. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 2014-Juni 2018, masalah korupsi di pemerintah kabupaten/kota mencapai 242 kasus dan di pemerintah provinsi 116 kasus.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-7)

### Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten/Kota 2017

Sangat Baik (A+)	Baik (B)	Baik (B-)	Cukup (C)	Cukup (C-)
18 Kabupaten/Kota	23 Kabupaten/Kota	20 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten/Kota

**Lima teratas:**

1 Kota Yogyakarta	11 Kota Kudus	1 Kota Cimahi	1 Kota Sukabumi	1 Kab Deli Serdang
2 Kab Bandung	2 Kota Manado	2 Kota Tarakan	2 Kab Bangkai	2 Kab Makatubi
3 Kota Banjarmasin	3 Kab Baryuwangi	3 Kota Banda Aceh	3 Kota Gorontalo	3 Kab Manokwari
4 Kota Balikpapan	4 Kota Jakarta Selatan	4 Kota Medan	4 Kab Kampar	4 Kab Donggala
5 Kota Samarinda	5 Kota Bengkulu	5 Kota Pangkal Pinang	5 Kota Ternate	

1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 4. ....  
 5. ....

**Catatan:**

- Evaluasi adalah tingkat pelayanan publik yang
- Berdasarkan model dan penilaian secara langsung.
- Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang independen sebagai pemantau utama (IU).
- Sumber: Indeks Kemudahan Berusaha 2019, Indeks dan Kemudahan Berusaha 2018, Laporan dan Reformasi Birokrasi

ENFORKAPAL, BERKAS



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005